



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GANEFRI**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **101632**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.735.700.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.300.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 530.400.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/260 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
5. Tanah Seluas 1961 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 870.000.000
6. Tanah Seluas 555 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 382.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, HONDA H-RV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 207.490.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 4.269.697.255**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.594.887.255
III. HUTANG	Rp.	17.875.128
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.577.012.127

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.